

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur menjadi hal penting dalam kemajuan perekonomian di suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi distribusi barang serta jasa. Infrastruktur yang baik membantu meningkatkan efisiensi, konektivitas, dan kemudahan akses, sehingga berperan penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas penduduk, serta memperluas akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Di sektor ekonomi, infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik bagi investor, memperkuat daya saing suatu negara, serta membantu menciptakan lapangan kerja. Infrastruktur tidak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi, tetapi juga secara langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Fasilitas infrastruktur yang andal dan merata di berbagai daerah meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan publik, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah.

Menurut Dirjen Bina Konstruksi, perbaikan jalur distribusi utama seperti jalan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

menyatakan bahwa, perkerasan fleksibel atau aspal minyak digunakan pada sekitar 95,61% dari jaringan jalan nasional, Ini menunjukkan bahwa bahan-bahan ini adalah bahan yang paling banyak digunakan dalam pembangunan jalan di Indonesia. Salah satu indikator yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah kualitas jalan yang baik. Dalam konteks ini, perusahaan konstruksi aspal memegang peranan yang sangat vital.

Perusahaan pada bidang kontraktor yaitu perusahaan yang bergerak dalam jasa konstruksi jalan, bangunan, jembatan, terowongan, bendungan dan lainnya. Konstruksi aspal merupakan salah satu bidang industri yang sangat dinamis dan kompleks. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan konstruksi seringkali menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan kompleksitas proyek, mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya, hingga penyelesaian proyek yang memerlukan waktu yang panjang. Perusahaan konstruksi membutuhkan waktu kurang dari satu tahun untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek, yang disebut kontrak jangka pendek, dan lebih dari satu tahun, yang disebut kontrak jangka panjang. Proyek dengan kontrak jangka panjang harus lebih diperhatikan dalam pengakuan pendapatan karena sering terjadi masalah. Hal ini karena laporan keuangan harus dibuat sementara proyek belum selesai, sehingga perlu menentukan berapa banyak pendapatan yang harus diakui selama satu tahun. Selain itu, manajemen dan pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan akan menemukan kesulitan dalam hal ini (Subagja & Pradipto, 2019).

Perusahaan dianggap berhasil apabila mampu memajemen aktivitas usahanya dengan baik. Manajemen yang baik dalam perusahaan adalah manajemen

yang mampu mempertahankan pertumbuhan usahanya serta memperoleh laba sampai batas maksimal. Oleh sebab itu, pihak dari manajemen perusahaan harus mampu membuat keputusan yang tepat karena hal ini menyangkut masa depan perusahaan. Untuk meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, sebuah keputusan harus dibuat dengan tepat waktu, tepat sasaran, efektif, dan dari sumber yang dapat dipercaya. Segala informasi akuntansi yang mencakup laporan keuangan pada perusahaan, merupakan informasi penting dan berpengaruh pada keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada akuntansi digunakan kinerja yang untuk suatu harusnya periode dapat menggambarkan entitas tersebut (Fajrianto, 2019). Perlakuan akuntansi berisi tahapan yang sangat penting pada pengelolaan laporan keuangan karena akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan tersebut (Giovanny, 2023). Dalam perlakuan akuntansi, terdapat proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Perlakuan akuntansi dalam mengakui pendapatan jasa konstruksi harus diakui berdasarkan periode kegiatan dan menggunakan catatan pengukuran yang handal serta objektif (Sabriadi, 2023).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pada perusahaan konstruksi yakni pengakuan pendapatan yang tepat. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba yang didapatkan oleh perusahaan (Wiraswati & Hikmah, 2021). Laba merupakan tujuan dari Perusahaan, karena laba yang tinggi dapat menarik investor ke dalam perusahaan (Devi, 2024). Pendapatan adalah faktor penting dalam menghitung laba, karena menyangkut keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Semakin banyak pendapatan

yang diperoleh, semakin besar kemampuan suatu perusahaan untuk menanggung segala jenis biaya dikeluarkan. Masing-masing perusahaan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda dalam menghasilkan labanya. Hal ini bergantung pada manajemen laba, karena laba menjadi tujuan bagi perusahaan swasta sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada *stakeholder* serta dapat menjadi cerminan kinerja manajer pada perusahaan (Martadinata, 2022). Dalam konteks akuntansi, pengakuan pendapatan perusahaan konstruksi memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor lainnya, karena proyek konstruksi umumnya memerlukan waktu penyelesaian yang panjang dan melibatkan kontrak yang rumit (Firdiana et al., 2024). Dalam pengakuan pendapatan, perusahaan jasa konstruksi berkaitan dengan kontrak yang disepakati dengan pelanggan atau pemberi kerja. Pendapatan dihasilkan dari nilai aktivitas kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu kontraktor dan pemberi kerja.

Pengakuan pendapatan dalam perusahaan konstruksi harus dilakukan dengan tepat. Hal tersebut karena pengakuan pendapatan yang tidak tepat akan menimbulkan dampak negatif seperti pelaporan keuangan yang tidak akurat yang tidak dapat mencerminkan kondisi sebenarnya dari kinerja perusahaan. Dampak lainnya yaitu timbulnya masalah otoritas dengan pajak akibat pelaporan pajak yang tidak tepat khususnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen perusahaan dalam perencanaan strategis jangka panjang dan ekspansi bisnis dalam bentuk pengambilan proyek baru yang terganggu akibat ketidakakuratan laporan keuangan. Hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa pendapatan diakui sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku dan prinsip-prinsip akuntansi yang benar. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan menjaga kepercayaan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan estimasi yang akurat dan andal atas pendapatan yang diakui untuk periode berjalan, serta memastikan pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK No. 115. Umumnya pendapatan diakui pada saat pekerjaan selesai. Tetapi menurut standar akuntansi keuangan, perusahaan konstruksi dapat mengakui dan melaporkan pendapatan selama proses pelaksanaan proyek sesuai dengan tahap waktu di mana pendapatan tersebut harus diakui dan dilaporkan.

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi No. 115 adalah salah satu standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan oleh Perusahaan. PSAK No. 115 ini menggantikan PSAK No. 72 mengenai pendapatan kontrak dari pelanggan yang juga mengadopsi IFRS 15. Perubahan ini telah disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia) yang menetapkan perubahan penomoran standar menjadi tiga digit angka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Entitas yang menggunakan PSAK sebagai acuan akuntansi wajib mengadopsi PSAK No. 115 dalam kebijakan akuntansinya. Dengan efektivitas yang dimulai pada tanggal tersebut, laporan keuangan untuk periode yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan seterusnya akan dipengaruhi oleh penerapan PSAK No. 115. Oleh karena itu, laporan keuangan yang diterbitkan untuk tahun buku 2024 sampai seterusnya turut terdampak oleh implementasi standar ini. Selain itu, akuntan juga diberikan wewenang untuk menetapkan standar akuntansi dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip internasional yang

dikenal dengan *principle based* yang sebelumnya dikenal dengan pendekatan *rules based*. Pergantian *rules based* ke *principle based* ini memberikan fleksibilitas bagi akuntan yang dimana sebelumnya akuntan hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh FASB (*Financial Accounting Standards Board*) (Hasanah & Musfiroh, 2024).

Sebelum PSAK No. 115 ini berlaku, terdapat beberapa perubahan dari PSAK No. 34, kemudian menjadi PSAK No. 72, dan yang berlaku saat ini yakni PSAK No. 115. PSAK No. 34, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang kontrak konstruksi. Standar ini telah digunakan secara luas oleh entitas yang terlibat dalam industri konstruksi untuk mencatat pendapatan dan biaya yang terkait dengan proyek-proyek konstruksi. PSAK 34 memberikan pedoman tentang bagaimana pendapatan dari kontrak konstruksi harus diakui, baik pada saat kontrak ditandatangani maupun saat progres pekerjaan dilakukan. Namun, meskipun PSAK No. 34 telah memberikan kerangka kerja yang berguna, terdapat beberapa keterbatasan dalam penerapannya. Salah satu keterbatasan utama dari PSAK No. 34 adalah bahwa pengakuan pendapatan tidak selalu mencerminkan realitas ekonomi dari kontrak yang lebih kompleks. Misalnya, dalam proyek konstruksi yang melibatkan banyak tahapan atau perubahan dalam lingkup pekerjaan, pengakuan pendapatan yang dilakukan berdasarkan metode tertentu mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan entitas (Nariswari, 2016).

Untuk mengatasi keterbatasan ini, PSAK No. 72 diterbitkan sebagai pengganti PSAK 34 dan beberapa standar lainnya, termasuk PSAK No. 32 dan ISAK No. 21. PSAK No. 72 diadopsi dari IFRS 15, yang mulai berlaku di Eropa

pada Januari 2018. Standar ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis prinsip dalam pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK No. 72 memperkenalkan model lima langkah untuk pengakuan pendapatan, yang mencakup identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban kinerja, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan saat kewajiban kinerja dipenuhi. Dengan penerapan PSAK No. 72, entitas diharapkan dapat mencatat pendapatan dengan cara yang lebih akurat dan transparan, mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya dari kontrak yang dijalankan. Hal ini juga memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, termasuk investor dan regulator, karena laporan keuangan yang dihasilkan lebih relevan dan dapat diandalkan. PSAK No. 72 ini berlaku sampai dengan tahun 2023 yang selanjutnya digantikan dengan PSAK No. 115.

PSAK No. 115 merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki dan menyelaraskan standar akuntansi di Indonesia. Perubahan dari PSAK No. 72 ke PSAK No. 115 lebih ke penyesuaian administratif dan penomoran, tanpa banyak mengubah substansi (Deviyanti Sofia Rachman & Siti Sundari, 2024). Standar ini berfokus pada pengelolaan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan, termasuk pencadangan untuk penurunan nilai aset keuangan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan konsistensi dan kemudahan pemahaman standar akuntansi di Indonesia. PSAK No. 115 mengadopsi pendekatan yang lebih modern dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, yang sejalan dengan perkembangan internasional. Dengan adanya PSAK No. 115, entitas diharapkan dapat lebih baik dalam memberikan informasi yang lebih transparan kepada pemangku kepentingan yang juga mencerminkan upaya IAI untuk menyelaraskan

standar akuntansi Indonesia dengan IFRS, sehingga memudahkan entitas yang beroperasi di pasar global.

Secara keseluruhan, pergantian dari PSAK No. 34 ke PSAK No. 72 dan kemudian ke PSAK No. 115 menunjukkan evolusi yang signifikan dalam standar akuntansi di Indonesia. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi laporan keuangan. Dengan penerapan standar-standar ini, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan regulator, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Proses ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengikuti praktik akuntansi internasional yang terbaik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Perubahan dari PSAK No. 34 ke PSAK No. 72 dan kemudian ke PSAK No. 115 mencerminkan pergeseran signifikan dari pendekatan berbasis aturan (*rule-based*) menuju pendekatan berbasis prinsip (*principle-based*) dalam pengakuan pendapatan. Pergeseran ini tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap ketentuan teknis, tetapi juga pada substansi ekonomi dari transaksi yang terjadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan relevansi laporan keuangan, sehingga memberikan informasi yang lebih andal dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan regulator. Dengan menerapkan PSAK No. 115, perusahaan diharapkan dapat mengelola pengakuan pendapatan dengan lebih konsisten, terstruktur, dan selaras dengan standar

internasional, seperti IFRS 15, yang mendorong harmonisasi praktik akuntansi secara global. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif dalam menghadapi kompleksitas transaksi bisnis modern.

Tabel 1. 1
Perbedaan PSAK No. 34 dengan PSAK No. 72 dan PSAK No. 115

Aspek	PSAK No. 34	PSAK No. 72	PSAK No. 115
Tanggal efektif	17 Desember 2010	1 Januari 2020	1 Januari 2024
Penggantian	Dihapus dan digantikan oleh PSAK No. 72	Menggantikan PSAK No. 23, 34, 44, ISAK No. 21 dan 27	Menggantikan PSAK No. 72 (mengubah nomor menjadi tiga digit)
Pendekatan	<i>Rules-based</i>	<i>Principle based</i>	<i>Principle based</i>
Fokus utama	Pengakuan pendapatan berdasarkan tahap penyelesaian kontrak	Pengakuan pendapatan berdasarkan kontrak dan kewajiban pelaksanaan	Menyediakan informasi tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan
Tahap pengakuan pendapatan atau metode pengakuan	Metode kontrak selesai dan metode penyelesaian (pendekatan biaya dan fisik)	Lima tahapan: Identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, mengakui pendapatan saat kewajiban dipenuhi	Lima tahapan dalam PSAK No. 72 yang dimasukkan ke bagian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

(Sumber: Data diolah dari website IAI, 2025)

PSAK No. 115 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam laporan keuangan. Namun, masih

terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip akuntansi yang terkandung di dalamnya, khususnya di sektor kontraktor konstruksi aspal. Banyak perusahaan kontraktor menghadapi tantangan dalam menerapkan PSAK No. 115 ini. Selain itu, belum, terdapat penelitian mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK No. 115 ini pada perusahaan jasa kontraktor konstruksi aspal, penelitian terdahulu hanya menggunakan PSAK No. 115 dan PSAK. No 72. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti dan Siti (2024) dengan judul “Analisis Pengakuan Pendapatan Kontrak Berdasarkan PSAK 115 Pada PT Syma Berkah Indonesia”, selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Fiya dan Siti (2024) dengan judul “Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Outsourcing PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia Berdasarkan PSAK No. 115” serta penelitian yang dilakukan oleh Lailatul dan Luluk (2024) dengan judul “Analisis Pengakuan Pendapatan dari Pemanfaatan Limbah Produksi PT. SGN PG Glenmore Berdasarkan PSAK 115”. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana perusahaan-perusahaan kontraktor konstruksi mengadaptasi standar ini dalam praktik akuntansi mereka sehari-hari. Penting juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan PSAK No. 115, termasuk aspek manajerial, budaya organisasi, serta pelatihan dan pemahaman staf akuntansi.

PT. Palguna Jaya adalah perusahaan kontraktor konstruksi berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional sejak tahun 2008. PT. Palguna Jaya yang beralamat di Singaraja Kab. Buleleng. Perusahaan PT. Palguna Jaya ini memiliki kualifikasi M1. PT. Palguna Jaya dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi: PT. Palguna Jaya dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub

klasifikasi: BG007 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan, BG008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways. Namun mulai dari 2010, Perusahaan ini lebih berfokus pada jasa pelaksanaan konstruksi jalan raya. Proyek yang dikerjakan oleh perusahaan ini tidak hanya dimulai pada awal periode akuntansi, tetapi ada pula yang dimulai di pertengahan periode akuntansi dan masih berlangsung karena masa pengerjaannya belum selesai. Selain itu, proyek yang telah diselesaikan oleh perusahaan ini juga dilengkapi dengan masa garansi atau pemeliharaan selama 12 bulan setelah proyek selesai. Dalam pengakuan pendapatan, PT. Palguna Jaya mengacu pada progres penyelesaian proyek yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian kontrak. Progres pekerjaan tersebut kemudian menjadi dasar untuk pengajuan termin pembayaran, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.

Penerimaan pendapatan dalam bentuk termin yang dilakukan setiap tiga bulan sekali atau setiap bulan sekali sesuai dengan nilai atau jangka waktu penyelesaian proyek. Dalam hal ini, PT. Palguna Jaya melakukan pencatatan dalam bentuk jurnal harian dalam pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh bagian accounting pada Perusahaan. Sementara pada bagian leader proyek menyusun laporan progres fisik bulanan berdasarkan tingkat penyelesaian fisik yang telah dicapai. Laporan tersebut kemudian dituangkan ke dalam laporan prestasi proyek. Setelah direksi lapangan melakukan pemeriksaan di lokasi dan menyetujui laporan prestasi proyek, Laporan

tersebut dimasukkan ke dalam laporan perkembangan pekerjaan. Selanjutnya, perusahaan menghitung pendapatan yang diakui untuk periode terkait dengan cara mengalikan persentase penyelesaian fisik yang telah disetujui dengan nilai kontrak, setelah dikurangi PPN. Pada saat melakukan pengakuan pendapatan, perusahaan menggunakan caranya sendiri pada penyelesaian proyek. Staf accounting pada perusahaan tersebut juga belum mengetahui bahwa pengakuan pendapatan dari kontrak terdapat pada PSAK No. 115.

Dengan memahami kesenjangan (*gap*) yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 115 terhadap laporan keuangan perusahaan kontraktor konstruksi aspal. PSAK No. 115, yang mengatur tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, memiliki implikasi signifikan terhadap praktik akuntansi, terutama di sektor konstruksi yang memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan pendapatan dan biaya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 115 Pada PT Palguna Jaya”.

Penelitian ini difokuskan pada analisis bagaimana PT Palguna Jaya, sebagai salah satu perusahaan kontraktor konstruksi aspal, mengimplementasikan PSAK No. 115 dalam pengakuan dan pelaporan pendapatannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan standar tersebut, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya

dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan praktik akuntansi di sektor konstruksi, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun pedoman yang lebih efektif dan relevan untuk penerapan standar akuntansi di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi, akademisi, dan regulator dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di industri konstruksi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Tantangan perlakuan akuntansi pendapatan yakni pada kesulitan dalam mengestimasi-mengestimasi tingkat penyelesaian proyek dan laba kotor, yang berdampak pada pengakuan pendapatan yang tepat.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan PSAK No. 115.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada analisis perbandingan perlakuan akuntansi pendapatan berdasarkan PSAK No. 115 di PT. Palguna Jaya. Fokusnya adalah mengevaluasi implementasi standar tersebut dalam pengakuan dan pelaporan pendapatan, serta membandingkannya dengan praktik sebelumnya. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian tetap terfokus dan menghindari penafsiran yang terlalu luas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh PT. Palguna Jaya?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan PT. Palguna Jaya menurut PSAK No. 115?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh PT. Palguna Jaya.
2. Untuk mengetahui perbandingan perlakuan akuntansi pendapatan PT. Palguna Jaya dengan PSAK No. 115.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil pembahasan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga informasi terkait dengan penerapan Perlakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 115 pada Perusahaan PT terbuka maupun PT tertutup seperti PT. Palguna Jaya. Walaupun penerapannya tidak wajib untuk PT tertutup, PSAK No. 115 ini dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak PT Palguna Jaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak keuangan PT. Palguna Jaya terkait dengan topik pembahasan yang diteliti, yaitu Perlakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 115 pada PT. Palguna Jaya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat terkait pengakuan pendapatan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi latihan dan juga penerapan ilmu yang sudah diperoleh pada saat melaksanakan perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan yang dimiliki oleh peneliti terkait dengan bagaimana analisis dan identifikasi Perlakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK NO. 115 Pada PT. Palguna Jaya.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan analisis dan Perlakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 115 Pada PT. Palguna Jaya.